

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012)**

**Ika Nurwati<sup>1</sup>, Rina Trisnawati<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

[ikanurwati31@gmail.com](mailto:ikanurwati31@gmail.com)

[rina.trisnawati@ums.ac.id](mailto:rina.trisnawati@ums.ac.id)

***Abstract***

*The study entitle "an analysis of the factors that affecting Internal Control Weakness of local government (case study in the District and the city of Central Java province in the period 2011-2012)". The purpose of this study was to examine the Size, Economy Growth, population, PAD, and capital expenditures of the local government to internal control weaknesses. The population in this study is the city and regency of Central Java province. They are 35 regencies and cities as sample of this research. The sampling technique used saturated sample techniques. The secondary data used in this study . It sourced from [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) and [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id). The hypothesis tested by multiple linear regression analysis. The results of the research indicate that size, economic growth, and the PAD have no effect on internal control weaknesses. While the population and capital expenditures have significantly affect on internal control weaknesses.*

**Keywords:** *Internal Control Weaknesses, Size, Economic Growth, Population, PAD, and Capital Expenditures.*

## **1. PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang bersumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih atau *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* sebagaimana dituntut oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga donor internasional tersebut, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas sosial, politik, maupun ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam merancang sistem pengendalian intern (SPI) daerah mereka. SPI di desain untuk mampu mendeteksi adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktifitas pengendalian, yang meliputi: (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, (3) Kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah daerah pada tahun 2011 menemukan 368 kasus kelemahan sistem pengendalian internal, tahun 2012 BPK menemukan kasus kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 415 kasus di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Meningkatnya jumlah temuan kasus yang terkait kelemahan pengendalian internal tentu tidak sejalan dengan harapan pemerintah yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester 1 tahun 2012 kelemahan pengendalian internal banyak terjadi dikarenakan para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, lemahnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan kasus demikian maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memberikan sanksi yang tegas untuk mengurangi kasus-kasus yang menyebabkan kerugian daerah.

Sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap pemerintah untuk mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, aset daerah serta meminimalkan kelemahan pengendalian internal yang terjadi untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Hartono, et al. (2014), Larassaty, et al. (2013), Martini dan Zaelani (2011), dan Kristanto (2009) melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono, et al. (2014) dan Martini dan Zaelani (2011), menemukan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi memiliki kelemahan pengendalian yang rendah. Pemerintah daerah diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal untuk mengurangi terjadinya kelemahan pengendalian internal sedangkan Larassaty, et al. (2013) dan Kristanto (2009) menemukan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh kelemahan pengendalian internal. Penelitian Martini dan Zaelani (2011), menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono, et al. (2014), menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan penelitian Larassaty, et al. (2013), pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian internal.

Jumlah Penduduk berpengaruh kelemahan pengendalian internal. Larassaty, et al. (2013), jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu provinsi membuat semakin kompleks pemerintah dikarenakan semakin banyak yang harus dilayani dan diatur, sehingga membuat pekerjaan pemerintah semakin rumit, sedangkan Martini dan Zaelani (2011), menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif.

PAD berpengaruh kelemahan pengendalian internal. Hartono, et al. (2014) dan Martini dan Zaelani (2011), PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal sedangkan Larassaty, et al. (2013) dan Kristanto (2009) PAD berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan sistem pengendalian internal terhadap pendapatan asli daerah.

Belanja Modal berpengaruh kelemahan pengendalian internal. Kristanto (2009) Belanja Modal berpengaruh negatif kelemahan pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik terhadap banyak kasus korupsi dan kolusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik kembali untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, Jumlah Penduduk, PAD, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi (2011).

Menurut *Public Company Accounting Oversight Board PCAOB* (2004) dalam Hartono, et al (2014) menyatakan kelemahan pengendalian internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Tujuan Pengendalian Internal Pemerintah adalah (1) Melindungi aset negara baik aset fisik maupun aset data, (2) Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat, (3) Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal, (4) Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku Standar Akuntansi Pemerintah, (5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi, (6) Menjamin ditaatinya kebijakan Manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Sistem Pengendalian Internal adalah (1) Pengendalian preventif adalah pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi, (2) Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi, (3) Pengendalian korektif adalah pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi (Mahmudi, 2011).

### Ukuran Pemerintah Daerah

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Aset atau aktiva dipahami sebagai harta total. Daftar aset atau aktiva di dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid. Aktiva pada neraca disajikan pada sisi kiri secara berurutan dari atas ke bawah. Ukuran pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Semakin besar ukuran pemerintahan, maka semakin banyak pula kelemahan pengendalian internal yang ditemukan. Hal ini dikarenakan ukuran pemerintah daerah yang semakin besar cenderung memiliki pengawasan yang longgar, sehingga memerlukan pengendalian internal yang lebih memadai dan terinci (Larassati, et al. 2013).

Ukuran pemerintah daerah diduga berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern, artinya pemerintah yang besar dan berpendapatan tinggi justru lebih banyak memiliki kelemahan pengendalian internal (Kristanto, 2009).

H1: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah mengukur prestasi dari perkembangan suatu daerah dari suatu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan dari segi ekonomi apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. Kegiatan ekonomi berasal dari berbagai sektor seperti kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa (Larassaty, et al. 2013).

Menurut Hartono, et al. (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal.

H2: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern

### **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk adalah semua orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut penelitian penelitian Martani dan Zaelani (2011), jumlah penduduk yang banyak akan membuat tekanan dan pengawasan terhadap pengendalian intern pemerintah daerah lebih besar. Pemerintah daerah terdorong untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai sebagai pertanggungjawaban publik.

H3: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011).

Menurut Larassati, et al. (2013), PAD berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena PAD (bersumber dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) secara leluasa dikelola oleh daerah, sehingga terdapat kemungkinan penyelewengan pada dana tersebut.

H4: Pendapatan asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

### **Belanja Modal**

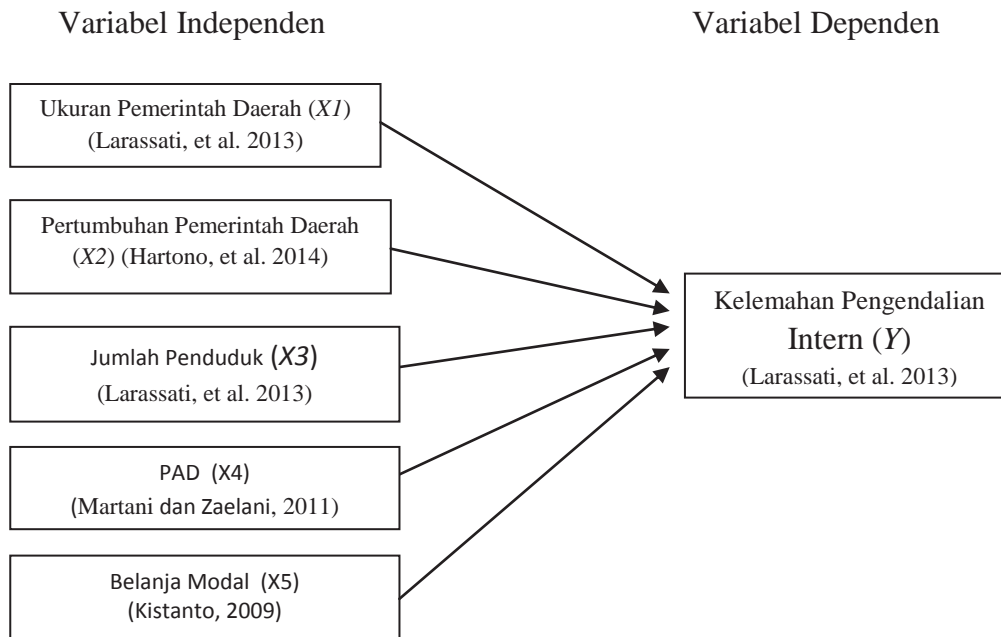
Belanja Modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan bentuk fisik lainnya (Kristanto, 2009).

Menurut Abdullah (2008) dalam Kristanto (2009) Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena semakin besar anggaran belanja modal yang tidak dimbangi dengan sistem pengendalian yang semakin

baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi oleh pihak legislatif dan eksekutif yang tidak bertanggungjawab.

H5: Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

### Kerangka pemikiran



## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena dan/atau teori-teori dengan menggunakan analisis statistik dan pengukuran variabel-variabel.

### Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasinya sehingga tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik sampel jenuh (Sugiono, 2008).

### Variabel dan Pengukurannya

#### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah dengan jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian internal pada laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikatornya. Jumlah kasus terkait kelemahan pengendalian intern diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 dan 2012 di Jawa Tengah. Kelemahan pengendalian intern tersebut didapatkan dengan melihat tingkat

kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Kelemahan SPI = Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan + Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja + Jumlah kasus kelemahan struktur pengendalian

### Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah.

#### a. Ukuran Pemerintah Daerah

Indikator dari variabel ini yaitu total *asset* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Ukuran pemerintahan (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. (Suharjanto, et al. (2010) dalam Larassati, et al. (2013)).

$$\text{Ukuran} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pada penelitian ini PDRB diukur berdasarkan harga berlaku yaitu dengan:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_{t_1} - \text{PDRB}_{t_0}}{\text{PDRB}_{t_0}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB<sub>t<sub>0</sub></sub>: Pendapatan Regional Bruto tahun sebelumnya

PDRB<sub>t<sub>1</sub></sub>: Pendapatan Regional Bruto tahun sekarang

#### c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu daerah dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan mempunyai bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah atau berkurang.

$$\text{Jumlah Penduduk} = \text{Ln} (\text{Jumlah Penduduk}).$$

#### d. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang –

undangan (Pasal 6 ayat 1), yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

- a) Hasil Pajak Daerah (HPD)
- b) Hasil Retribusi Daerah (HRD)
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (HPKH)
- d) Lain-lain PAD yang Sah (LPS)

$$\text{PAD} = \text{Ln} (\text{HDP} + \text{HRD} + \text{HPKH} + \text{LPS})$$

#### e. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, kemudian aset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk:

1. Belanja Modal Tanah (BMT).
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BMPPM).
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BMGB).
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BMJIJ).
5. Belanja Modal Fisik Lainnya (BMFL).

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln} (\text{BMT} + \text{BMPPM} + \text{BMGB} + \text{BMJIJ} + \text{BMFL})$$

#### Alat Analisis Data

Data penelitian ini digunakan alat analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$\text{KPI} = \alpha + \beta_1 \text{Uk} + \beta_2 \text{PE} + \beta_3 \text{PAD} + \beta_4 \text{JP} + \beta_5 \text{BM} + e$$

Keterangan :

KPI	= Kelemahan Pengendalian Internal
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Slope atau koefisien regresi
Uk	= Ukuran Pemerintah Daerah
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
JP	= Jumlah Penduduk
BM	= Belanja Modal
e	= Koefisien <i>error</i>

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik, untuk memenuhi asumsi klasik data tersebut harus berdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolinieritas, heterokedstisitas, serta autokorelasi.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Coefficient	Beta	t <sub>hitung</sub>	Sig	Keterangan
(Constanta)	-9,502		-0,370	0,713	
Ukuran	0,779	0,177	1,202	0,235	H1 Ditolak
Pertumbuhan	0,279	0,148	1,098	0,277	H2 Ditolak
Jml_Pend	-1,961	-0,474	-2,975	0,005	H3 Diterima
PAD	-1,686	-0,258	-1,624	0,111	H4 Ditolak
BM	2,478	0,404	2,473	0,017	H5 Diterima
Adjusted R <sup>2</sup>	0,197				
F <sub>hitung</sub>	0,640				

Berdasarkan tabel 1 di atas hasil analisis regresi linear berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KPI} = -9,502 + 0,779 \text{ Ukuran} + 0,279 \text{ Pertumbuhan} - 1,961 \text{ Jml\_Pend} - 1,686 \text{ PAD} + 2,478 \text{ BM} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstan untuk persamaan regresi menunjukkan sebesar -9,502. Artinya jika ukuran, pertumbuhan, jumlah penduduk, PAD, dan belanja modal dianggap konstan/tetap, maka jumlah kelemahan pengendalian internal akan menurun sebesar 9,502 kasus.
- b. Nilai koefisien ukuran pemerintah daerah sebesar +0,779 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan total aset sebesar Rp1, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 0,779 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan total aset sebesar Rp1, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,779 kasus.
- c. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi +0,279 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 0,279 kasus. sebaliknya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 0,279 kasus.
- d. Nilai koefisien jumlah penduduk -1,961 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 jiwa, akan berdampak pada penurunan KPI sebesar 1,961 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah penduduk 1 jiwa, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 1,961 kasus.
- e. Nilai koefisien PAD sebesar -1,686 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan PAD sebesar Rp1, akan berdampak pada penurunan KPI sebesar 1,686 kasus. Sebaliknya apabila terjadi penurunan PAD Rp1, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 1,686 kasus.
- f. Nilai koefisien belanja modal sebesar +2,478 menyatakan bahwa jika terjadi kenaikan belanja modal sebesar Rp1, akan berdampak terhadap kenaikan KPI sebesar 2,478 kasus, sebaliknya apabila terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp1, akan berdampak terhadap penurunan KPI sebesar 2,478 kasus.
- g. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas.



## Hipotesis

Variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai  $t_{hitung}$  (1,202) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar (2,008) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,235 > \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu H1, ditolak, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Ini dikarenakan besar atau kecilnya total aset pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya sudah baik. Pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan terhadap aset secara baik sesuai dengan kehendak rakyat, karena aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai  $t_{hitung}$  (1,098) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar (2,008) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,277 > \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu H2, ditolak, artinya Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Ini dikarenakan semakin besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sebagian besar daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, namun pertumbuhan yang baik belum tentu diikuti dengan peningkatan maupun pengurangan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal.

Variabel jumlah penduduk mempunyai  $t_{hitung}$  (-2,975) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar (2,008) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,005 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu H3, diterima, artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Jumlah penduduk yang banyak akan membuat tekanan dan pengawasan terhadap pengendalian intern pemerintah daerah lebih besar. Dengan demikian pemerintah daerah terdorong untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai sebagai pertanggungjawaban publik. Hal ini berarti semakin banyak jumlah penduduk harus didukung oleh perkembangan teknologi, informasi baik di desa maupun kota.

Variabel PAD mempunyai  $t_{hitung}$  (-1,624) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar (2,008) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,111 > \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu H4, ditolak, artinya PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan atau penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki PAD yang lebih rendah.

Variabel belanja modal mempunyai  $t_{hitung}$  (2,473) lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar (2,008) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,017 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu H5, diterima, artinya belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Dikarenakan belanja modal yang tinggi belum tentu sistem pengendalian internalnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyelewengkan belanja modal tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data dalam penelitian mengenai pengaruh ukuran, pertumbuhan, jumlah penduduk, PAD dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah (studi kasus pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2012), diperoleh kesimpulan:

1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
3. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.
4. PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.
5. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

## Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat dikemukakan keterbatasan dan saran sebagai berikut :

1. Periode yang dipakai oleh peneliti hanya 2 tahun maka peneliti berikutnya menambah periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah saja. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya wilayah penelitian diperluas lagi tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012*. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 22 Januari 2015
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013*. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada 22 Januari 2015.
- Data Jumlah Penduduk kabupaten dan kota tahun 2011-2012. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 8 Januari 2015.
- Data PDRB Provinsi Jawa Tengah 2011-2012. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada 8 Januari 2015.
- Direktorat Jendral Departemen Keuangan. *Data Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2011-2012*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 5 Februari 2015.
- Direktorat Jendral Departemen Keuangan. *Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2011-2012*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 5 Februari 2015.
- Direktorat Jendral Departemen Keuangan. *Data Realisasi APBD 2011-2012*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 5 Februari 2015.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, R, A. Mahmud dan N.S. Utaminingsih. 1014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi XXVII*. 24-27 September 2014. Mataram. Lombok. Hal. 1-13.
- Kristanto, S. B."Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal". 2009. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*. Vol. 9. No. 1. ISSN: 1411-691X.
- Larassati, R, R. Anggraini dan E. Gerendrawaty. 2013. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah

- daerah Provinsi di Indonesia Periode 2009-2010”. *Simposium Nasional Akuntansi XXVI*. 25-28 September 2013. Manado. Hal. 3679-3708.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UIIPress
- Martani, D dan F. Zaelani. 2011. “Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XXIV*. 21-22 Juli 2011. Banda Aceh. Hal. 1-27
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA